

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Muhammadiyah dan Politik**

Sejak berdirinya pada 1912, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang bergerak di bidang dakwah. Haidar Nashier menyebutkan Muhammadiyah tidak berjuang di lapangan politik serta tidak memiliki hubungan apa pun dengan kekuatan politik mana pun di negeri ini. Bersama berjalannya waktu Muhammadiyah terus membentengi dirinya dengan apa yang disebut "khittah" (garis perjuangan) yang telah mendarah daging dalam persyarikatan ini. Pembuktian pada khittah ini terlihat dari: Khittah Palembang (1956-1959), khittah Ponorogo (1969), Khittah Ujung Pandang (1971), Khittah Denpasar (2002).<sup>1</sup>

Pada prinsipnya melalui khittah yang dilangsungkan beberapa kali ingin melakukan penegasan ulang bahwa secara garis besar menentukan kebijakan dan orientasi gerakannya untuk:

1. Menentukan garis-garis organisasi yang mengikat dan ditaati oleh seluruh anggotanya sebagai kebijakan, arahan, pedoman dan ketentuan dalam bersikap dan bertindak atas nama organisasi.
2. Menempatkan secara objektif dan verifikasi kerja mengenai lapangan dakwah pembinaan masyarakat dengan lapangan perjuangan politik untuk meraih kekuasaan negara.
3. Penegasan posisi dan peran Muhammadiyah yang bergerak di lapangan dakwah dan tidak bergerak di lapangan politik-praktis atau politik yang berorientasi pada kekuasaan.

---

<sup>1</sup> Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2008), hlm. 15

4. Garis kebijakan organisasi yang menetapkan tidak ada hubungan organisatoris dengan kekuatan/partai politik mana pun sebagai posisi objektif untuk bersikap netral/berjarak dan tidak mengimpitkan diri, mendukung, dan bekerja sama secara politik dengan organisasi politik tersebut.
5. Garis kebijakan yang memberi kebebasan kepada anggotanya untuk aktif atau tidak aktif dalam partai politik, serta untuk memilih atau tidak pilihan politik sesuai dengan hak asasinya dengan ketentuan yang digariskan perserikatan.
6. Pandangan teologis Muhammadiyah tentang politik sebagai arena "urusan duniawi" yang berlaku hukum ijtihad dan kebijakan organisasi.
7. Peran-peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga kendati tidak aktif/tidak memilih perjuangan politik praktis, tetapi proaktif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan bernegara serta menentukan sikap tertentu terhadap kebijakan-kebijakan negara sebagaimana layaknya kekuatan masyarakat atau kelompok kepentingan dalam sebuah negara yang demokratis dengan posisi sebagai kekuatan moral-keagamaan dan bukan sebagai kekuatan politik.<sup>2</sup>

Ketegasan Muhammadiyah untuk tidak berpolitik dari semangat khittah sejak tahun 1956 hingga 2002 terkandung isyarat penting yang lain perlu dilihat, bahawa sebenarnya Muhammadiyah jauh lebih antipatif dalam menyikapi dunia politik dan menyadari banyak kemusykilan soal politik kekuasaan. Karena itu Muhammadiyah menggariskan khittahnya agar tetap istiqamah dalam mengembangkan fungsi dakwah dan tajdidnya sebagai gerakan Islam yang berkiprah dalam lapangan kemasyarakatan dan tidak dalam lapangan politik praktis. Muhammadiyah melihat bagaimana jatuh bangunnya Nahdlatul Ulama (NU) menjadi partai

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 44

politik (1952-1971) dalam dua periode (Orde lama-Orde Baru) yang akhirnya kembali ke khittah NU tahun 1984.<sup>3</sup>

Meskipun demikian Muhammadiyah menyadari dalam perjalanannya tidak lepas dari pengaruh dan tarikan politik. Kondisi politik tertentu memang selalu memberikan tekanan bahkan paksaan tertentu kepada Muhammadiyah untuk melahirkan ”ikhtiar” atau ”tajdid politik”. Fakta sejarah telah memperlihatkan bahwa organisasi ke masyarakatan dimasuki oleh politik, kendati antara satu organisasi Islam dengan lainnya memiliki keberagaman pola dalam memainkan peran politiknya. Dunia politik telah memberikan tekanan atau paksaan tertentu untuk mengambil peran politik. Baik untuk mencegah kedaruratan seperti himbauan untuk tidak memilih partai politik tertentu yang merugikan umat Islam maupun pertimbangan untuk kemaslahatan umat, bangsa dan Muhammadiyah sendiri seperti dalam sejumlah kasus tuntutan politik itu selalu ada. Namun secara umum Muhammadiyah tetap berada dalam garis utama sebagai gerakan dakwah dan tajdid dilapangan ke masyarakatan.

Menurut Haedar Nashir, tidak sedikit kalangan internal Muhammadiyah berusaha untuk melibatkan atau menyentuh organisasi Islam ini dalam kepentingan politik tertentu. Tumbuh argumentasi yang tampak sekilas meyakinkan, bahwa jika Muhammadiyah pasif apalagi apatis terhadap politik maka tidak akan mendapatkan apa-apa baik berupa keuntungan politik maupun lainnya. Sebaliknya, menurut pandangan pro-politik ini, manakala Muhammadiyah bersifat aktif, maka akan memperoleh banyak keuntungan, termasuk dukungan dana dan kebijakan publik. Karena itu, khittah tidak harus dimaknai pasif, apalagi anti dan negatif terhadap politik. Berkembanglah istilah atau idiom baru seperti “netralitas aktif” dan “menjaga kedekatan yang

---

<sup>3</sup> Saat ini Muhammadiyah dan NU sama-sama berjalan di jalur gerakan dakwah dan tidak memasuki lahan politik praktis yang keduanya dikenal sebagai dua sayap Islam terbesar dan representasi Islam moderat di Indonesia. *Ibid.*

sama” sebagai antitesis terhadap khittah yang bersifat “netral pasif” dan “menjaga jarak yang sama” terhadap dunia politik.<sup>4</sup>

## **B. Kebijakan Muhammadiyah Sumatera Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018**

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Sumatera Utara pada tahun 2013 melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung untuk pertama kalinya untuk tataran propinsi. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi lokal ini juga mendapat respon dari berbagai organisasi politik dan organisasi massa lainnya untuk mengambil langkah dan kebijakan dalam melihat dan membahas tentang pesta demokrasi ini termasuk salah satunya adalah Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Sumatera Utara tahun 2013, Muhammadiyah Sumatera Utara yang merupakan organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu komponen yang cukup penting dalam mengawal dan mensukseskan pesta demokrasi tingkat lokal ini. Dan merupakan suatu kebutuhan bagi Muhammadiyah untuk mengambil kebijakan strategis bagi kemashlahatan organisasi dan masyarakat Sumatera Utara. Sesuai dengan hadist yang mengatakan pentingnya memilih seorang pemimpin :

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْتُوا أَحَدَهُمْ

*“Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.”* (HR Abu Dawud).

---

<sup>4</sup> Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2008), hlm. 3

Menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur tahun 2013, Muhammadiyah Sumatera Utara disibukan dengan rangkaian aktifitas menjelang Pilkada. Dari aktifitas pembangunan koalisi umat Islam bersatu untuk memajukan calon Islam-Islam sampai Penetapan Calon gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara. Dalam pembangunan koalisi umat Islam bersatu ini, Muhammadiyah Sumatera Utara bersama beberapa organisasi Islam lainnya seperti Al Jamiatul Alwashliayah, NU, dan organisasi islam lainnya membicarakan kriteria bakal calon yang nantinya akan direkomendasikan kebeberapa partai politik untuk di daftarkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam koalisi umat Islam bersatu ini tidak mampu menghasilkan hasil yang optimal dalam pembahasan akhirnya. Meski pada pembangunan koalisi Umat Islam bersatu tidak menghasilkan keputusan, tetapi Muhammadiyah Sumatera Utara tidak lepas dari targetan para pasangan calon untuk mendukung mereka dalam pilkada Sumatera Utara tahun 2013. Hal ini dapat kita lihat dari kehadiran dan silaturrahi pasangan calon ke kantor Muhammadiyah Sumatera utara.

Dalam merespon pesta demokrasi lokal ini, Muhammadiyah Sumatera Utara tidak tinggal diam saja. Muhammadiyah Sumatera Utara membangun jalur komunikasi dengan struktur dan ortom yang berada di bawah naungannya. Tidak hanya itu saja, melalui kegiatan rutin tahunan yakni Rapat Pimpinan Wilayah yang merupakan rapat untuk mengambil kebijakan organisasi Muhammadiyah Sumatera Utara dalam satu tahun ini yang dihadiri unsur anggota pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Ketua Umum dan Sekretaris Umum Cabang Muhammadiyah se Sumatera Utara, Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom setingkat Pimpinan Wilayah serta Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.

Dalam Rapat pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun ini, agenda pembahasan tidak terlepas dari pengambilan kebijakan politik Muhammadiyah Sumatera Utara dalam merespon pesta demokrasi lokal di Sumatera Utara.

Dalam pengambilan kebijakan Muhammadiyah Sumatera Utara melalui Rapat Pimpinan Wilayah tentang kebijakan politik Muhammadiyah Sumatera Utara mengalami perdebatan yang cukup menarik, pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara yang hadir bersilaturahmi ke sekretariat Muhammadiyah Sumatera Utara yakni pasangan Chairuman Harahap-Fadly Nurzal, Gus Irawan-Soekirman, dan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi, menjadi konsumsi peserta Rapat Pimpinan Wilayah untuk di analisis dan diperjuangkan untuk menghasilkan suatu kesepakatan akan dukungan kepada salah satu calon pasangan tersebut.

Melalui perdebatan yang cukup alot tersebut Rapat pimpinan wilayah yang telah berlangsung mengambil kebijakan tentang pemilihan kepala daerah secara aklamasi akhirnya menyatakan bahwa Muhammadiyah mengambil posisi netral.<sup>5</sup> Netral disini artinya adalah Muhammadiyah Sumatera Utara mendukung dan siap mengawal serta mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara tahun 2013.

Shohibul Anshor Siregar<sup>6</sup> mengatakan bahwa sikap netral Muhammadiyah Sumatera Utara dalam pemilihan Kepala Daerah ini karena Muhammadiyah sebagai sebuah lembaga melihat bahwa membangun ukhuwah islamiyah itu lebih utama ketimbang melahirkan permusuhan di karenakan permasalahan dukung mendukung terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah ini.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sekertaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.

<sup>6</sup> Beliau adalah Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hasil rapat pimpinan wilayah ini juga memberikan kebebasan seluas- luasnya bagi anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam memilih pemimpin kedepan, warga Muhammadiyah harus mengikuti hasil tarjih Pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan setiap anggota Muhammadiyah yang terlibat dalam tim sukses pasangan calon, Muhammadiyah mengimbau agar warganya tetap menjaga independensi organisasi dan tidak membawa nama lembaga dalam aktifitasnya.

Kebijakan yang dihasilkan dalam rapat pimpinan wilayah muhammadiyah ini dapat dimaklumi. Karena Muhammadiyah mencoba mengembalikan pencitraan dirinya dari tarik menarik kepentingan politik yang berlangsung selama ini. Bukan berarti Muhammadiyah tidak peduli terhadap pesta demokrasi lokal yang terselenggara, tetapi Muhammadiyah mencoba membangunya melalui kerja-kerja kultural dengan cara pendidikan dan penyadaran politik terhadap anggotanya. Keputusan rapat pimpinan wilayah ini bukan hanya sebatas mengambil posisi netral saja dalam pemilihan gubernur mendatang, tetapi juga mengeluarkan instruksi kepada anggotanya untuk memilih calon gubernur yang beragama Islam dan wakil gubernur yang beragama Islam juga. Hasil-hasil keputusan ini nantinya akan di tanfidzkan atau di undangkan dalam bahasa sehari-hari untuk di sosialisasikan dan dilaksanakan oleh anggota Muhammadiyah.

Kebijakan mengambil posisi netral ini menegaskan kembali bahwa Muhammadiyah Sumatera Utara ingin memosisikan diri sebagai sebuah lembaga yang netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik manapun dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dinyatakan dalam poin keenam:

*Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.<sup>7</sup>*

Pernyataan yang tertuang dalam khittah ini merupakan ikrar diri organisasi Muhammadiyah dalam menjelaskan posisi dan peranan yang sesuai dengan realitas sosial politik umat. Muhammadiyah mengambil posisi sebagai oposisi yang kritis dalam tiap-tiap kebijakan pemerintah. Tentang hubungan individu anggota dengan organisasi politik lainnya, khittah perjuangan ini juga telah jelas menjelaskan posisi anggotanya, yakni :

*Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota perserikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai dengan hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan misi dan kepentingan Muhammadiyah demi kemaslahatan bangsa dan negara. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam partai politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (akhlakul karimah), keteladanan (uswah hasanah), dan perdamaian (ishlah). Aktivitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi perserikatan dan melaksanakan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar.<sup>8</sup>*

Jadi sangat dapat dimengerti mengapa Muhammadiyah secara serius menyikapi perkembangan politik lokal yang terjadi di Sumatera Utara ini. Melalui kebijakan yang di keluarkan dan berdasarkan hasil sidang tanwir 2002 di Bali tentang peran perjuangan

---

<sup>7</sup> Hasil sidang tanwir 2002 di Bali yang menegaskan tentang khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

<sup>8</sup> Penjelasan khittah perjuangan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hasil tanwir 2002 di Bali

Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah Sumatera Utara kembali menepis anggapan dari masyarakat tentang keberpihakan Muhammadiyah Sumatera Utara kepada salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara.

Kebijakan ini juga memperlihatkan bahwa banyak anggota Muhammadiyah yang terlibat dalam tim sukses pasangan calon gubernur, sehingga Muhammadiyah Sumatera Utara secara tegas menginstruksikan kepada setiap anggotanya agar tidak mengatas namakan Muhammadiyah demi kepentingan politik sesaat. Organisasi dan anggota organisasi sulit untuk dipisahkan, oleh karena itu Muhammadiyah menegaskan setiap anggota yang terlibat dalam tim sukses pasangan calon merupakan hak individunya dalam mempergunakan hak politiknya, tetapi individu anggota tidak dibenarkan untuk mengatasnakan organisasi. Kebijakan ini berlaku bagi Muhammadiyah dan organisasi otonom di bawah naungan Muhammadiyah Sumatera Utara.

Karena bagi Muhammadiyah Sumatera Utara urusan politik praktis yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan adalah sepenuhnya diserahkan kepada partai politik dan rakyat yang menentukan. Bukan berarti Muhammadiyah akan tinggal diam dengan perkembangan politik, tetapi Muhammadiyah akan bekerja menciptakan sumber daya politik yang bermoral yang membawa aspirasi perjuangan Muhammadiyah di arena politik praktis. Melalui sumber daya politik yang merupakan kader Muhammadiyah yang terlibat dalam partai politik.

Perhatian Muhammadiyah terhadap kehidupan politik lebih dipengaruhi oleh misi pergerakan organisasi yang hendak menciptakan dan mewujudkan kehidupan yang lebih Islami. Karena Islam merupakan *rahmatan lil alamin* bagi Muhammadiyah, sehingga perwujudan dan aktualisasi ajaran Islam menjadi lebih utama bagi Muhammadiyah, bila dibandingkan dengan persoalan yang bersifat politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan.

Kebijakan yang dikeluarkan merupakan salah satu usaha Muhammadiyah Sumatera Utara untuk tetap menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang tidak memiliki kaitan dengan organisasi sosial dan politik. Kebijakan ini mengembangkan kembali ideologi perserikatan Muhammadiyah yang sudah mulai pudar ditengah-tengah para anggotanya.

### **C. Pengaruh Kebijakan Muhammadiyah Sumatera Utara Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013.**

Meskipun kuatnya arus dalam sejumlah argumentasi, kritik dan tuntutan terhadap Muhammadiyah dalam rangka reinterpretasi khittah perjuangannya, sekali lagi terlihat bahwa posisi Muhammadiyah tetap mengambil sikap netral terhadap politik dan partai sebagaimana diputuskan melalui Mukhtamar ke-38 Makassar tahun 1971 yang terus dipertahankan. Prinsip netral terhadap partai sebagai upaya menghindari benturan kepentingan antara kecendrungan kultur (umat) dan struktural (kekuasaan). Partai cenderung berorientasi sangat sempit dan bersifat duniawiyah, sementara Muhammadiyah memiliki visi membangun umat dan bangsa dalam arti yang luas. Kendati bersikap netral, Muhammadiyah tetap memiliki perhatian proses politik seperti proses legislasi di Parlemen dan Pengambilan kebijakan pemerintah.<sup>9</sup>

Hal tersebut juga dapat dilihat pada kepengurusan Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2013 yang akan menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, melalui perdebatan yang cukup alot tersebut Rapat pimpinan wilayah yang telah berlangsung mengambil kebijakan tentang pemilihan kepala daerah secara aklamasi akhirnya menyatakan bahwa Muhammadiyah mengambil posisi netral.<sup>10</sup> Netral disini artinya adalah Muhammadiyah Sumatera Utara

---

<sup>9</sup> Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 391-392

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sekertaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.

mendukung dan siap mengawal serta mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara tahun 2013.

Menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 ini, kiranya dengan kebijakan yang di keluarkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu mengambil sikap netral terhadap para calon yang akan maju. Bukan berarti Muhammadiyah tidak peduli terhadap pesta demokrasi lokal yang terselenggara, tetapi Muhammadiyah mencoba membangunya melalui kerja-kerja kultural dengan cara pendidikan dan penyadaran politik terhadap anggotanya. Keputusan rapat pimpinan wilayah ini bukan hanya sebatas mengambil posisi netral saja dalam pemilihan gubernur mendatang, tetapi juga mengeluarkan instruksi kepada anggotanya untuk memilih calon gubernur yang beragama Islam dan wakil gubernur yang beragama Islam juga. Kebijakan mengambil posisi netral ini menegaskan kembali bahwa Muhammadiyah Sumatera Utara ingin memosisikan diri sebagai sebuah lembaga yang netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik manapun dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara.

Kebijakan yang diambil Muhammadiyah Sumatera Utara sangat mempengaruhi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2013 terkhusus bagi warga Muhammadiyah yang ada di Sumatera Utara untuk memilih pasangan calon Islam-Islam pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013. Kebijakan Muhammadiyah Sumatera Utara untuk bersikap netral dan memberik intruksi kepada warga nya untuk memilih pasangan Islam-Islam tersebut bukan hanya sebatas untuk menjaga citra dan independensi Muhammadiyah tetapi juga mempengaruhi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 yang menghasilkan pasangan Gatot Pujo Nugroho –

Tengku Erry Nuradi keluar sebagai pemenang pemilu pada Sumatera Utara yang notabene pasangan tersebut merupakan pasangan Islam-Islam.

#### **D. Analisis**

Perkembangan politik di kalangan Muhammadiyah itu ditandai oleh kehadiran M. Amien Rais di panggung politik nasional dengan mendirikan partai politik yang bersifat terbuka (inklusif), yaitu Partai Amanat Nasional pada hari Ahad 23 Agustus 1998 di Jakarta. Kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) pimpinan M. Amien Rais itu dalam kaitan dengan perjalanan tokoh Muhammadiyah ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari semangat gerakan reformasi yang dipelopornya bersama mahasiswa dan komponen bangsa lainnya sejak dirinya menggagas isu suksesi kepemimpinan nasional pada sidang tanwir Muhammadiyah di Surabaya pada 1993 yang diikuti oleh langkah-langkah politik yang kontroversial sepanjang lima tahun sesudahnya. Sejak Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai Presiden.

Hubungan antara Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi perantara dan organisasi politik setelah terbentuknya PAN ini dipandang sebagai bagian dari ijtihad politik Muhammadiyah.<sup>11</sup> Tidak pernah terjadi sebelumnya Muhammadiyah memiliki sedemikian dekat dengan partai politik selama pemilihan umum dan Pemilu Presiden; juga tidak pernah berlangsung sebelumnya perdebatan yang begitu dinamis dan terbuka tentang politik di tingkat Muhammadiyah dan di kalangan para pemimpinnya. Kedua organisasi ini memainkan kontribusi yang signifikan terhadap proses demokrasi Indonesia.

Peran politik Muhammadiyah, dalam beberapa hal dilakukan elitnya, seperti Amien Rais. Reputasi Amien Rais di kalangan Muhammadiyah memberi efek positif bagi PAN. Partai ini dengan mudah berdiri di berbagai daerah atas dukungan warga Muhammadiyah. Sejak kelahiran

---

<sup>11</sup> Suaidi Asyari, *Nalar Politik Muhammadiyah*, (Yogyakarta : LKIS, 2009), hlm. 128-129

PAN itulah tumbuh dinamika politik baru dalam Muhammadiyah. Hampir sebagian besar elit dan warga Muhammadiyah diberbagai tingkatan aktif sebagai inisiator dan kemudian banyak di antaranya yang aktif sebagai pengurus dan pimpinan PAN, selain hanya menjadi pendukung dan simpatisan. Kelahiran PAN itu hingga batas tertentu menumbuhkan persaingan politik di kalangan intern Muhammadiyah sendiri. Haidar Nashir menjelaskan gejala persaingan politik dapat dilihat dari beberapa indikasi:

1. Sebagian besar elit dan warga Muhammadiyah aktif dan mendukung PAN, sementara lainnya masih mendukung partai lama seperti PPP, Golkar, PBB, dan PKS.
2. Implikasi dari gejala yang pertama, tumbuh gesekan kepentingan antar elit dan warga Muhammadiyah dalam memperluas dukungan masing-masing partai, seperti Pemilu 1999 menimbulkan ketegangan politik tertentu di kalangan Muhammadiyah. Gesekan itu diwarnai pula oleh wacana teologis tentang pluralisme dengan keanggotaan PAN yang terbuka bagi semua kalangan termasuk bagi warga yang beragama non-Islam.<sup>12</sup>

Dalam situasi yang seperti ini Muhammadiyah relatif beruntung karena secara umum kondisi internal dalam tubuh organisasi ini dapat terkendali sehingga tidak mengarah pada fragmentasi dan disintegrasi politik yang membahayakan keuntuhan Muhammadiyah. Keadaan ini didukung oleh:

1. Kedewasaan sikap politik pada umumnya elit dan warga Muhammadiyah untuk tetap memelihara keutuhan dan kepentingan Muhammadiyah di atas kepentingan pribadi dan kelompok politik.

---

<sup>12</sup> Haedar Nashir, *Perilaku Politik Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Tarawang, 2000), hlm. 213-214.

2. Kebijakan Muhammadiyah secara organisasi yang tetap menjaga jarak dan sikap netral dari kekuatan politik manapun sebagaimana ditunjukkan oleh edaran PP Muhammadiyah.
3. Munculnya kekuatan moderat di kalangan Muhammadiyah sendiri dari elit dan warga yang tidak terlibat langsung dalam partai politik sehingga menjadi salah satu faktor peredam dari berbagai konflik kepentingan politik.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat fakta menunjukkan bahwa budaya politik Muhammadiyah sebagaimana terkandung dalam semangat Khittah 1971 dan termanifestasi dalam alam pikiran para elit dan warganya relatif stabil dan konsisten dalam pola yang moderet. Kelahiran PAN kendati memperoleh dukungan luas sehingga terkesan berhimpitan langsung dengan Muhammadiyah sendiri, sebagaimana dipandang oleh banyak pihak, ternyata tidak serta merta mengubah budaya politik moderet Muhammadiyah dalam menyikapi keadaan yang kritis sekalipun. Secara normatif dan aturan resmi organisasi, Muhammadiyah masih mampu menjaga jarak dengan partai politik. Sikap netral ini tergambar melalui surat PP Muhammadiyah yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah dan daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia yang menyerukan agar menjaga kemurnian dan keutuhan organisasi.

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 214